

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO.  
08/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP PENENTUAN NISBAH BAGI  
HASIL PEMBIAYAAN MODAL USAHA MELALUI AKAD  
*MUSHĀRAKAH* DI BPRS LANTABUR CABANG SURABAYA 1**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Suci Rahmawati**

**NIM. C92217176**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Surabaya**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Rahmawati  
NIM : C92217176  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum  
Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : *Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.  
08/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Penentuan Bagi Hasil  
Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad Mushārahah  
di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1*

*Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya  
sendiri, kecuali bagian bagian yang dirujuk sumbernya.*

Surabaya, 19 Juli 2021

Saya yang menyatakan,

  
  
Suci Rahmawati

C92217176

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad *Mushārah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1” ditulis oleh Suci Rahmawati NIM. C92217176 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 19 Juli 2021

Pembimbing,



**H. Mohammad Budiono, S.Ag., M.Pd.I**

NIP. 1971101020007011052

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Suci Rahmawati NIM. C92217176 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 29 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I



H. Mohammad Budiono, S.Ag., M.Pd.I  
NIP. 197110102007011052

Penguji II



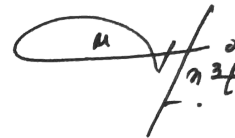
Dr. H. Mohammad Arif, MA  
NIP. 197001182002121001

Penguji III



A. Mufti Khazin, MH.I  
NIP. 197303132009011004

Penguji IV



Mega Ayu Ningtyas, S.H.I, M.H  
NIP. 199312042020122017

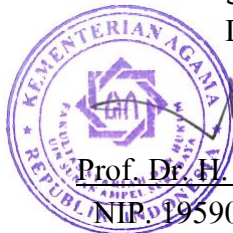
Surabaya, 29 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Suci Rahmawati  
NIM : C92217176  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam  
E-mail address : suci260399@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO. 08/DSN-MUI/IV/2000**

**TERHADAP PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN MODAL USAHA**

**MELALUI AKAD *MUSHĀRAKAH* DI BPRS LANTABUR CABANG SURABAYA 1**

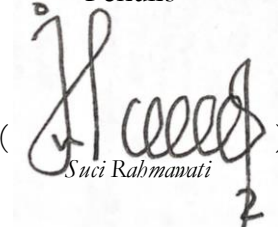
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Agustus 2021

Penulis

(  )  
Suci Rahmawati

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad *Mushārah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu; (1) Bagaimana praktik penentuan nisbah bagi hasil pada akad *mushārah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1? (2) Bagaimana analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik penentuan nisbah bagi hasil pada akad *mushārah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1?

Data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa pihak yang terkait, dan dokumentasi yang selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; (1) Praktik penentuan nisbah bagi hasil akad *mushārah* BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 ialah dengan menggunakan bentuk persentase, namun BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 juga menggunakan penominalan yaitu menentukan dalam bentuk rupiah di awal akad sebelum mengetahui dengan pasti keuntungan yang di dapat oleh nasabah dari usaha penginapan yang dijalankan Bapak Elvanus yang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 81.000.000,00 selama 6 bulan perjanjian *mushārah* dan jual-beli alat kesehatan yang dijalankan Bapak Hari Setiawan yang mendapatkan keuntungan Rp. 450.000.000,00 selama 2 bulan. (2) Praktik penentuan nisbah bagi hasil akad *mushārah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 tidak sah menurut hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, karena tidak sesuai dengan salah satu syarat *mushārah* yaitu menentukan bagi hasil dalam jumlah rupiah di awal akad. Karena usaha yang dijalankan oleh nasabah belum jelas keuntungannya. Selain itu juga penetapan nisbah bagi hasil tersebut bersifat *flat* tidak mengikuti naik turunnya keuntungan yang diperoleh nasabah setiap bulannya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak yang berkaitan dengan kontrak akad *mushārah* disarankan; (1) hendaknya BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 tidak melakukan penominalan keuntungan bagi hasil dalam bentuk rupiah ketika di awal akad, karena keuntungan hasil usaha yang diperoleh nasabah belum pasti. (2) Bagi nasabah hendaknya lebih terbuka dan jujur dalam membuat laporan keuangan dengan benar dan memberikan keterangan naik turunnya laba usaha setiap bulannya.











*Mushārah* secara bahasa sering pula disebut *shirkah* yang berarti percampuran (*ikhtilāt*), yaitu bercampurnya harta satu dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan. Secara terminologi, *mushārah* ialah akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan. *Mushārah* juga berarti akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk bermitra dalam modal dan keuntungan serta kerugian yang diperoleh dan dibagi secara proporsional atas kesepakatan bersama.<sup>6</sup> Pada akad *mushārah*, bank dan mitra menyediakan dana untuk mendanai bisnis tertentu, termasuk bisnis yang sudah ada dan bisnis yang sedang berkembang. Selain itu, mitra dapat secara bertahap atau segera mengembalikan modal dan menyepakati pembagian keuntungan ke bank.

<sup>6</sup> Chefi Abdul Latif, “*Pembiayaan Mudhārahah dan Pembiayaan Mushārakah di Perbankan Syariah*”. Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Vol. 2, No. 10, Januari 2020, 14.

*Mushārah* merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini dilandaskan

pada dalil yang terdapat dalam Q.S. *Ṣād* ayat 24 yaitu:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Daud berkata: ‘Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.’ Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S. *Sād*: 24)<sup>7</sup>

Ayat ini merujuk pada diperbolehkannya praktik akad *mushārah*. Lafaz *al-khulāʿ* dalam ayat tersebut diartikan saling bersekutu/*partnership*. Bersekutu dalam konteks ini ialah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan dan menjalankan usaha. Dengan pemahaman ini, terlihat jelas bahwa *mushārah* mendapatkan legalitas dari syariah.<sup>8</sup>

Modal sebagai obyek akad *mushārah* harus diberikan secara tunai dan dapat berupa uang, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modalnya berbentuk aset, maka harus dinilai terlebih dahulu dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Modal *mushārah* tidak boleh dipinjam, dipinjamkan, disumbangkan atau dihadiahkan kepada pihak lain oleh para pihak yang berakad, kecuali atas dasar kesepakatan. Pada

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), 454.

<sup>8</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 134.

Apabila ditinjau dari segi risiko pemberlakuan agunan sebagai syarat yang mutlak pada pembiayaan *mushārahah*, maka tidak adanya keadilan antara pihak nasabah dan bank, karena risiko dalam pendanaan Islam harus ditanggung bersama antara nasabah dan bank dengan sistem *profit and loss sharing*. Dengan keharusan pemberian jaminan oleh nasabah kepada pihak bank berarti apabila terjadi kerugian hanya nasabah yang menanggungnya, sedangkan pihak bank akan terbebas menanggung kerugian.<sup>11</sup>

Nisbah merupakan persentase keuntungan yang disebutkan dalam akad kerjasama yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan porsi dalam permodalan yang di setorkan. Misalnya dua orang yang melakukan akad *mushārah* dengan modal yang disetorkan masing-masing 50%, maka nisbah bagi hasilnya 50:50. Nilai nominal hasil yang benar-benar diterima baru dapat diketahui setelah adanya hasil pemanfaatan dari dana tersebut.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Sofyan S. Harahap, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPEF Usakti, 2010), 325.

<sup>11</sup> Mahmududats Sa'diyah dan Nur Azizroh, “*Musharakah dalam Fiqh dan Perbankan Syariah*”, Jurnal Vol.2, No. 2, Desember 2014, 324.

<sup>12</sup> Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, “*Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Islam*”, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol. 1, No. 1, Juli 2011, 67 & 69.

BPRS Lantabur adalah Bank Pembiayaan Rakyat yang berbasis Syariah dan telah berdiri sejak tahun 2006 yang dalam pendiriannya sendiri diprakarsai oleh Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng dan kemudian diresmikan pada tahun 2014. BPRS Lantabur berkantor pusat di Jombang dan memiliki sebelas (11) cabang, salah satunya ialah BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1.<sup>14</sup>

BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 memiliki tiga (3) produk, yaitu pembiayaan, simpanan, dan jasa. Dalam produk pembiayaan akad-akad yang digunakan antara lain: *murābahah*, *mushārah*, *muḍārah*, dan multi jasa (*ijarah*). Dalam produk simpanan terdapat tabungan *muḍārah*, tabungan pelajar (*qalam*), tabungan *qardiyu* (*wadī'ah*), tabungan kurban (*taqarrub*),

<sup>14</sup> Pram Puji Rahayu, *Wawancara*, 05 Mei 2021.

Ketika ada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, maka pihak BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 akan bertanya kepada nasabah terlebih dahulu akan dimanfaatkan untuk apa pembiayaan tersebut. Setelah mengetahui pemanfaatan dana dari pembiayaan yang diajukan maka baru dapat ditentukan akad apa yang akan digunakan.

Sebelum melangsungkan akad dan untuk memperkecil risiko pembiayaan bermasalah, maka BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 memperketat pada survei dan berprinsip pada 5C, yaitu:<sup>16</sup>

1. *Character*, yaitu kepribadian nasabah yang mengajukan pembiayaan, hal ini dapat dilihat ketika sedang melangsungkan wawancara atau survei. Prinsip ini berfokus untuk menilai apakah calon nasabah dapat dipercaya dalam bekerjasama dengan pihak bank.
2. *Capacity*, yaitu melihat kemampuan calon nasabah untuk mengendalikan dan menjalankan bisnis yang dimilikinya. Prinsip ini untuk menilai kemampuan membayar pinjaman nasabah kepada bank.

<sup>15</sup> Laporan Magang Penulis pada BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 (12-20 Oktober 2020), 12-25.

<sup>16</sup> Pram Puji Rahayu, *Wawancara*, Surabaya, 11 Januari 2021.



*Mushārah* memiliki rukun dan syarat, rukun *mushārah* yaitu adanya akad atau *sighat*, dua pihak yang berakad, dan obyek akad yang berupa modal. Sedangkan syarat *mushārah* yaitu kerjasama tersebut merupakan transaksi yang boleh diwakilkan, persentase pembagian keuntungan bagi masing-masing pihak ditentukan ketika akad, dan keuntungan itu diambilkan dari keuntungan modal perserikatan.<sup>17</sup>

Bagi hasil yang seharusnya ialah yang sesuai syarat *mushārah* yaitu mengkuantifikasi dengan jelas keuntungan bagi masing-masing pihak dengan persentase, dan penentuan pembagian hasil tidak bisa disebutkan dalam

[illegible]



“Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra”.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisisnya dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad *Mushārah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1”.

Identifikasi masalah yaitu menerangkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat muncul saat penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.<sup>19</sup> Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

<sup>19</sup> Tim Penyusun Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), 8.

1. Praktik penentuan nisbah bagi hasil pada akad *mushārah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1.
2. Analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik penentuan nisbah bagi hasil pada akad *mushārah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, adanya permasalahan pada penentuan bagi hasil pembiayaan dengan akad *mushārahah*, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- [illegible]

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat dari penelitian yang pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga dapat terlihat bahwa penelitian/kajian ini bukanlah pengulangan dari penelitian sebelumnya.

1. Duwi Noviyanti (2019) dengan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Jaminan Pada Akad Pembiayaan *Mushārah* (Studi Kasus Pada KSPPS Al-Mubarak”. Topik utama dalam skripsi ini membahas tentang adanya jaminan dalam pembiayaan *mushārah* yang dilarang dan dikemukakan oleh Imam Mazhab. Akan tetapi dalam fikih muamalah selama kontrak atau persyaratan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariah maka adanya jaminan tersebut diperbolehkan.<sup>20</sup>

2. Riska Dwi Novita (2014) dengan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pembiayaan *Mushārahah* (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Komunitas Usaha Mikro Berbasis Masjid (KUM3) Rahmat Surabaya)”. Fokus

[illegible]

3. Raka Putra Perdana (2019) dengan skripsi yang berjudul *Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Musharakah dalam Pengelolaan Syariah Trade Center (STC) Pasar Turi Surabaya* membahas dalam skripsi ini tentang implementasi *musharakah* antara pihak Syariah Trade Center (STC) menyediakan tempat usaha bagi para pedagang dimana pedagang perlu membayar sewa kios, listrik dan sebagainya namun harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki KTP Indonesia, membayar produk, dan membayar deposit Rp 1 juta. Lalu deposit tersebut dikembalikan kepada pedagang apabila sudah tidak berjualan di Syariah Trade Center (STC).<sup>22</sup>

3. Raka Putra Perdana (2019) dengan skripsi yang berjudul *Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Musharakah dalam Pengelolaan Syariah Trade Center (STC) Pasar Turi Surabaya* membahas dalam skripsi ini tentang implementasi *musharakah* antara pihak Syariah Trade Center (STC) menyediakan tempat usaha bagi para pedagang dimana pedagang perlu membayar sewa kios, listrik dan sebagainya namun harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki KTP Indonesia, membayar produk, dan membayar deposit Rp 1 juta. Lalu deposit tersebut dikembalikan kepada pedagang apabila sudah tidak berjualan di Syariah Trade Center (STC).<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Raka Putra Perdana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan *Mushārahkah* di Pengelolaan Syariah Trade Center (STC) Pasar Turi Surabaya”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

### E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana praktik penentuan nisbah bagi hasil pada akad *mushārah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1.
2. Mengetahui bagaimana analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik penentuan nisbah bagi hasil pada akad *mushārah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1.

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat untuk para pembaca dan terlebih untuk penulis. Dengan begitu penulis membedakan kegunaan hasil penelitian menjadi dua, yaitu:

[illegible]



2. Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang bersifat mengikat serta menjadi hukum positif. fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 ialah aturan yang mengatur tentang pembiayaan *mushārahah*.
3. Modal Usaha adalah dana yang digunakan untuk menjalankan usaha agar tetap berjalan. Modal usaha juga dapat diartikan modal pertama kali membuka usaha, modal untuk melakukan perluasan usaha, dan modal untuk menjalankan usaha sehari-hari.<sup>25</sup>
4. *Mushārahah* ialah akad kerjasama yang terjadi antara pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai kontribusi modal.<sup>26</sup>
5. BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 merupakan suatu Lembaga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang mana memberikan jasa pembiayaan yang berada di Jalan Gayungsari Barat No. 89 Surabaya.

## H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara mendalam terkait latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok,

<sup>25</sup> Sari Julianty, *Cerdas Mendapatkan dan Mengelola Modal Usaha*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 4.

<sup>26</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 95.



Data yang dikumpulkan merupakan data yang disatukan dari keterangan-keterangan yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Data tersebut antara lain:

- ## 2. Sumber data

a. Sumber primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Ibu Pram Puji Rahayu selaku Pimpinan Cabang BPRS Lantabur  
Cabang Surabaya 1.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 6.



b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber pendukung yang didapatkan melalui buku-buku literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian, dan menunjang untuk menganalisis data, diantaranya:

- 1) Al-Qur'an.
- 2) Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/2000 tentang *Mushārah*.
- 3) *Fath al-Qorib*.
- 4) Fikih Muamalah.
- 5) Ekonomi Islam.
- 6) Konsepsi *Shirkah* dalam Islam Perbandingan antar Mahzab.
- 7) Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah.
- 8) Hukum Sistem Ekonomi Islam, dan lain sebagainya.

### 3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Untuk menggali sumber primer salah satu caranya adalah dengan menggunakan wawancara. Wawancara yang penulis lakukan baik secara terstruktur maupun secara tidak terstruktur dengan pihak-pihak sebagai berikut:



Analisis data merupakan mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematik, teratur, dan terstruktur sehingga penulis mendapatkan jawaban dari masalah yang telah dirumuskan.<sup>33</sup>

Merupakan strategi pemecahan masalah dengan cara menguraikan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berlandaskan fakta-fakta yaitu menyebutkan nominal nisbah bagi hasil di awal akad.

<sup>31</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 200.

<sup>33</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 239.

Agar memudahkan pembahasan dan penyusunan laporan penelitian ini, penulis mengelompokkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini menjadi lima bab, yang mana dalam masing-masing bab terdapat beberapa sub bab yang saling berkorelasi. Berikut rincian dalam sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori, yang membahas tentang teori *mushārah* dan fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000. Dalam hal ini meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, jenis-jenis, dan berakhirnya akad *mushārah*. Serta pembahasan mengenai fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mushārah*.

[illegible]

1. Sekaligus menjelaskan prosedur pembiayaan *mushārah* serta penentuan nisbah bagi hasil akad *mushārah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1.

Bab keempat merupakan analisis tentang penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mushārah* berdasarkan hukum Islam dan fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1.

Bab kelima merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah dikemukakan.





Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. (Q.S. *Shād*: 24)<sup>5</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَلِثُ الشَّرِيعِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا حَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Dari bu Hurairah r.a, dia berkata: ‘Rasulullah saw bersabda; Allah Ta’ala swt berfirman; ‘Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat maka Aku keluar dari (persekutuan) mereka.’’ (Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh al-Hakim)<sup>7</sup>

Maksud dari sunah ini adalah bahwa Allah akan menjaga dan melindungi keduanya. Allah akan menjaga harta keduanya dan memberkati perdagangan keduanya. Jika salah satu di antara keduanya

<sup>7</sup> Imam Hafiz Abu Dawud Sulaiman, Sunan Abu Dawud, (Beirut: Dar-al-Fikri, 1987), 543.









4) *Shirkah wujūh*

Yaitu *shirkah* antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan satu pihak sebagai *ṣāhibul māl* yaitu menyediakan dana untuk keperluan usaha, sedangkan pihak lain berkontribusi kerja sebagai pengelola usaha yang dijalankan, disebut sebagai *mudārib*.<sup>15</sup>

Yaitu *shirkah* antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi baik, sehingga mereka dipercaya untuk mengembangkan dan menjalankan suatu bisnis tanpa adanya modal. Misalnya, A dan B adalah orang yang dipercaya oleh C (pedagang), lalu A dan B ber-*shirkah* wujud, mereka membeli dagangan C tidak secara tunai. Kemudian A dan B bersepakat masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Kemudian barang tersebut dijual untuk memperoleh keuntungan dan dibagi dua, sedangkan harga pokok dari penjualan dikembalikan kepada C (pedagang). Oleh karena itu bisnis ini tidak membutuhkan modal, maka kontrak ini biasa disebut sebagai *shirkah* utang-piutang.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 86.

5) *Shirkah mufāwāḍah*

Yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam  
dalam suatu bisnis dengan syarat adanya kesamaan dalam  
modal, pembagian keuntungan dan kerugian, kesamaan  
kerja, tanggung jawab dan beban hutang.<sup>17</sup>

5. *Mushārahah* dalam produk perbankan syariah

*Mushārah* merupakan akad yang menyatukan modal antara dua pemilik modal untuk usaha tertentu, sedangkan yang menjalankan bisa ditunjuk salah satu dari mereka. Akad *mushārah* di implementasikan oleh Bank Syariah pada pembiayaan usaha atau proyek (*project financing*) yang jumlahnya tidak 100% dari Bank Syariah, sedangkan selebihnya oleh nasabah.<sup>18</sup>

Ketentuan mengenai akad *mushārah* ini telah diatur secara teknis dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam penyaluran dana pembiayaan berdasarkan akad *mushārah* berlaku persyaratan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu;

<sup>17</sup> Ibid., 85.

<sup>18</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 129.

<sup>19</sup> Pasal 8 PBI No.7/46/PBI/2005

- b. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati;
- c. Bank berdasarkan kesepakatan dengan nasabah dapat menunjuk nasabah untuk mengelola usaha;
- d. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang;
- e. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan;
- f. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah;
- g. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama sesuai kesepakatan;
- h. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- i. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian dari salah satu pihak;
- j. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut;
- k. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (tiering) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad;

Nisbah ialah rasio pembagian keuntungan (bagi hasil) *ṣāhibul māl* (bank) dan *muḍārib* (nasabah).<sup>20</sup> Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh atau estimasi pendapatan yang dihasilkan oleh *ṣāhibul māl* dan *muḍārib* dan tidak harus berdasarkan porsi modal yang diserahkan. Apabila usaha tersebut rugi akibat risiko bisnis, bukan akibat kelalaian *muḍārib* maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

<sup>20</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 553.

32

Terdapat dua cara yang diberikan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk menentukan nisbah bagi hasil dalam akad mushārahah, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* ialah cara menghitung bagi hasil berdasarkan hasil bersih dari total pendapatan yang telah dikurangi biaya-biaya yang diperlukan untuk memperoleh pendapatan tersebut. *Revenue sharing* ialah cara menghitung bagi hasil dari total pendapatan sebelum dikurangi biaya-biaya yang diperlukan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

7. Berakhirnya akad *mushārah*

Menurut ulama, sebab-sebab berakhirnya *mushārahah* yaitu:<sup>22</sup>

- a. Salah satu pihak *mushārah* meninggal dunia, gila, pailit, menarik diri dari keanggotaan perserikatan dalam waktu yang tidak ditentukan, dan keluar dari keanggotaan perserikatan.
- b. Berakhirnya jangka waktu perserikatan yang telah ditetapkan.

<sup>21</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Standar Produk Perbankan Syariah Mushārah dan Mushārah Mutanaqisah*, (Jakarta, 2016), 34

<sup>22</sup> Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), 106.





DSN telah diakui oleh peraturan perundang-undangan untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah. Legitimasi dari kedudukan fatwa DSN-MUI dalam mengatur ketentuan aspek syariah pada LKS dipayungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999, pada Pasal 31 menyebutkan bahwa:

“Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syariah diwajibkan untuk memperhatikan fatwa DSN-MUI.”<sup>25</sup>

2. Bagi hasil dalam fatwa DSN-MUI tentang *mushārah*

Pembiayaan *mushārah* telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mushārah*. Dalam poin 3c yang mengatur keuntungan menyebutkan bahwa:

“Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *mushārahah*.”

Yang dimaksud dengan “keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas”, menurut penulis ialah bahwa keuntungan tersebut harus ditentukan secara jelas dengan menggunakan persentase agar

<sup>24</sup> M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2010), 82.

<sup>25</sup> Ibid., 83.

“Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.”

“Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.”

[illegible]



1 Kantor di wilayah Gresik.<sup>2</sup>

## 2. Struktur organisasi

Struktur organisasi BPRS Lantabur Cabang Suarabaya 1 dalam pembagian kepengurusan ialah sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Pram Puji Rahayu berkedudukan sebagai Pimpinan Cabang yang bertugas untuk membuat Rencana Bisnis Bank (RBB) unit kerjanya/bisnis pada setiap awal tahun, mereview Rencana Bisnis Bank (RBB) yang sudah berjalan, menandatangani dokumen-dokumen kerjasama dengan lembaga/instansi pendukung, memastikan setiap pelaksanaan administrasi simpanan dan pembiayaan telah berjalan sesuai ketentuan, dan lain-lain.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Laporan Magang Penulis pada BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 (12-20 Oktober 2020), 4.

- b. Eni Rohimatul Fauziah berkedudukan sebagai *Customer Service* (CS) yang bertugas untuk melayani nasabah, mencatat data pengajuan ke dalam buku register, menghubungi nasabah yang menunggak, dan merangkap sebagai *Legal Officer* (LO) yang bertugas untuk pembuatan akta pembiayaan, proses akad dengan nasabah, pengarsipan berkas nasabah, dan lain-lain.
- c. Siti Sa'adah berkedudukan sebagai Teller bertugas untuk melayani nasabah yang akan melakukan setoran tabungan, penarikan tabungan, rekap transaksi teller, dan juga merangkap sebagai Operasional yang bertugas untuk mengecek saldo rekening bank di bank lain, mencatat transaksi harian, membuat laporan bulanan operasional, dan lain-lain.
- d. Ariyanto Wahyu Nugroho berkedudukan sebagai *Account Officer* (AO) yang bertugas untuk *lending officer*, menganalisis pengajuan pembiayaan dan survei.
- e. Nizar Rahman berkedudukan sebagai *Funding Officer* (FO) yang bertugas untuk marketing, mencari nasabah, dan mencari dana tabungan.
- f. Fahmi Noor Hisyam berkedudukan sebagai *Funding Officer* (FO) yang bertugas untuk marketing, mencari nasabah, dan mencari dana tabungan.
- g. Adhy Putra Wibawa berkedudukan sebagai *Senior Problem Financing* yang bertugas untuk penagihan pembayaran.

### 3. Produk-produk BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1

a. Pembiayaan

1) *Mushārah*

Merupakan kerjasama antara bank dengan nasabah yang mana masing-masing pihak berkontribusi dana kemudian mencampurkan dana/modal tersebut untuk usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan bersama. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, modal kerja, dapat juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana yang berifat *short time*.<sup>4</sup>

## 2) *Murābahah*

Yaitu akad jual beli antara bank dengan nasabah, yang mana bank akan melakukan pembelian atau pemesanan barang sesuai permintaan dan keinginan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah keuntungan untuk bank yang disepakati. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk konsumtif, misalnya pembelian kebutuhan alat perkuliahan, alat rumah tangga, maupun kendaraan bermotor.<sup>5</sup>

3) *Muḍārabah*

Merupakan kerjasama antara bank dengan nasabah yang mana seluruh modalnya 100% disediakan oleh bank dan nasabah sebagai pengelola usaha, dengan pembagian

<sup>4</sup> Ibid., 12.

<sup>5</sup> Ibid., 13.



4) Ijarah multi jasa

5) *Rahn* (gadai)

<sup>6</sup> Ibid., 14.

<sup>7</sup> Ibid., 15.

<sup>8</sup> Ibid., 18.



5) Tabungan haji & umrah (hijrah)

## 6) Deposito

c. Jasa

## 1) Transfer

## 2) Layanan PPOB

<sup>12</sup> Ibid, 21.

<sup>13</sup> Ibid, 22.

<sup>14</sup> Ibid, 23.

<sup>15</sup> Ibid, 24.

#### 4. Prosedur pembiayaan *mushārah*

- <sup>16</sup> Ibid., 25.

**B. Praktik Nisbah Bagi Hasil dalam Pembiayaan *Mushārah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1**

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Mulyadi selaku *Account Officer* (AO), yang menjadi patokan bagi hasil ialah modal awal. Pembahasan nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah terjadi pada saat *Account Officer* (AO) melakukan survei, setelah terjadi tawar menawar mengenai nisbah bagi hasil, kemudian atas persetujuan kedua belah pihak menyepakati nisbah yang telah ditentukan.<sup>18</sup>

Namun, sebelumnya bank akan menanyakan usaha apa yang akan dijalankan atau sedang dijalankan oleh nasabah. Setelah bank mengetahui usaha yang dijalankan, bank akan mempelajari perkiraan keuntungan yang di dapatkan nasabah setiap bulannya. Perkiraan keuntungan itulah yang menjadi acuan bank untuk menetapkan nominal bagi hasil yang harus dibayar oleh nasabah.

Nisbah yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut. Pembagian keuntungan bagi hasil berdasarkan laporan realisasi hasil usaha dari usaha nasabah. Pengembalian pokok pembiayaan dapat disepakati

<sup>17</sup> Mulyadi, *Wawancara*, Surabaya, 18 Mei 2021.

<sup>18</sup> Ibid., 05 Mei 2021.

19 Ibid.

secara fleksibel, dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha.<sup>20</sup>

Adapun perhitungan bagi hasil dalam akad pembiayaan *mushārahah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 sebagai berikut:

a. Bapak Elvanus mengajukan pembiayaan *mushārah* untuk menambah modal usaha pada jasa penginapan dan jual-beli *guesthouse* harian dengan total 3 kamar harga setiap kamarnya Rp. 150.000,00. 3 kamar x Rp. 150.000,00 = Rp. 450.000,00 per hari. Jika ditotal pendapatan perbulannya adalah Rp. 450.000,00 x 30 hari = Rp. 13.500.000,00 per bulan. Keuntungan yang diperoleh selama 6 bulan x Rp. 13.500.000,00 = Rp. 81.000.000,00. Sedangkan jual-beli *guesthouse* yang dilakukan oleh Bapak Elvanus tidak berjalan.<sup>21</sup> Pembiayaan *mushārah* yg diajukan Bapak Elvanus sebesar Rp 100.000.000,00 dengan jangka waktu angsur selama 6 bulan, berikut perhitungannya:

- 1) Modal dari BPRS Rp 100.000.000,00 dengan jangka waktu 6 bulan.
- 2) Bagi hasil yang diberikan oleh BPRS  $2\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 = \text{Rp } 2.000.000,00$  per bulan
- 3) Jumlah yang harus dibayar nasabah setiap bulan hingga bulan ke-5 adalah Rp 2.000.000,00, dan pada bulan ke-6 nasabah harus

<sup>20</sup> Standar Operasional Prosedur (SOP) BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1

<sup>21</sup> Elvanus, *Wawancara*, 4 Agustus 2021.

membayar Rp 2.000.000,00 untuk bagi hasil + Rp 100.000.000,00 untuk modal pokok = Rp 102.000.000,00 pada bulan ke 6.<sup>22</sup>

b. Bapak Hari Setiawan mengajukan pembiayaan *mushārah* untuk menambah modal usaha pada perdagangan alat kesehatan dengan pendapatan harian sekitar Rp. 7.500.000,00 x 30 hari = Rp. 225.000.000,00. Selama jangka waktu perjanjian *mushārah* 2 bulan x Rp. 225.000.000,00 = 450.000.000,00.<sup>23</sup> Bapak Hari Setiawan mengajukan pembiayaan sebesar Rp 425.850.000,00 dengan jangka waktu selama 2 bulan, berikut perhitungannya:

- 1) Modal dari BPRS Rp 425.850.000,00 dengan jangka waktu 2 bulan.
- 2) Bagi hasil yang diberikan oleh BPRS 1,5% x Rp 425.850.000,00 = Rp 6.387.750,00.
- 3) Jumlah yang harus nasabah bayar pada bulan pertama sebesar Rp 6.387.750,00 untuk bagi hasil, dan pada bulan ke-2 yang harus dibayar nasabah Rp 6.387.750,00 + Rp 425.850.000,00 untuk modal pokok = Rp 432.237.750,00.<sup>24</sup>

Dalam hal menentukan persentase nisbah bagi hasil antara Bapak Elvanus dengan Bapak Heri adalah berdasarkan kesepakatan bersama. Semakin tinggi pembiayaan yang diajukan, nasabah dapat menawar agar nisbah bagi hasil lebih diperkecil. Persentase minimal nisbah bagi hasil

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Hari Setiawan, *Wawancara*, 04 Agustus 2021.

<sup>24</sup> Mulyadi, Wawncara, 05 Mei 2021.



a. Bapak Elvanus yang bertempat tinggal di Jl. Simpang Apel No. 14, Sumbersekar, Dau-Malang. Saat di wawancarai, Bapak Elvanus mengatakan bahwa:

“Saya mengajukan pembiayaan guna menambah modal usaha pada jasa penginapan dan guesthouse. Untuk mengawasi usaha saya pihak BPRS meminta laporan progress kami secara berkala setiap bulannya. Pada saat melakukan survei terjadilah kesepakatan nisbah. Sebagai contoh kami mengajukan pembiayaan senilai Rp. 100.000.000 dengan kesepakatan nisbah bagi hasil 20:80 yang dengan begitu bagi hasil yang harus saya bayar Rp. 2.000.000 dan kami bayarkan setiap bulannya. Sebagai jaminan kami mengagunkan SHM tanah milik saya pribadi.”<sup>26</sup>

b. Bapak Hari setiawan yang bertempat tinggal Jl. Abimanyu No. 31A RT. 002/RW. 003 Kel. Pakunden Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo. Saat di wawancarai, Bapak Hari Setiawan mengatakan bahwa:

“Saya mengajukan pembiayaan untuk menambah modal usaha perdagangan alat kesehatan. BPRS meminta laporan progress untuk mengawasi usaha yang saya jalankan. Pada saat survei terjadi tawar menawar mengenai nisbah bagi hasil, nisbah bagi hasil yang saya sepakati dengan BPRS adalah 15:85. lalu setelah saya menyepakatinya BPRS menjelaskan mengenai perhitungannya dan ketemu Rp. 6.387.750 yang harus saya bayar setiap bulannya. Sebagai jaminannya saya mengagunkan SHM tanah saya.”<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Eni Rohimatul Fauziyah, *Wawancara*, 3 Agustus 2021.

<sup>26</sup> Elvanus, *Wawancara*, 4 Juni 2021.

<sup>27</sup> Hari Setiawan, *Wawancara*, 4 Juni 2021.

## BAB IV

BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 merupakan lembaga keuangan syariah yang dalam mengolah dananya menggunakan metode menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (*landing*). Dan salah satu produk *landing yang ada* pada BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 ialah pembiayaan *mushārahah*.

Tujuan dan manfaat pada produk pembiayaan *mushārah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 adalah untuk kebutuhan nasabah agar mendapatkan tambahan modal usaha terpenuhi setelah mendapatkan pembiayaan dari Bank. Selain dipergunakan untuk pembiayaan modal usaha, secara umum pembiayaan *mushārah* digunakan untuk pembelian barang investasi dan pembiayaan proyek.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Standar Operasional Prosedur (SOP) BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1

dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.<sup>2</sup>

Pada praktik akad *mushārah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan *mushārah* harus mengisi form permohonan terlebih dahulu dan melengkapi dokumen *mushārah* sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Fotokopi KTP,
2. Fotokopi surat nikah,
3. Fotokopi Kartu Keluarga,
4. Fotokopi legalitas usaha,
5. NPWP pribadi/perusahaan,
6. Data obyek pembiayaan,
7. Laporan keuangan 3 tahun terakhir,
8. Salinan rekening koran/tabungan 3 bulan akhir.

Setelah mengisi formulir permohonan pembiayaan dan semua dokumen yang diperlukan telah lengkap, selanjutnya legal akan mengecek riwayat kredit dari calon nasabah melalui SID BI/OJK Checking apakah baik atau buruk. Kemudian *Account Officer* (AO) akan melakukan survei ke rumah calon nasabah, pada saat survei berlangsung *Account Officer* (AO) akan melihat keseriusan dan karakter calon nasabah melalui wawancara yang dilakukan. Pihak bank yang diwakili oleh *Account Officer* (AO) akan

<sup>2</sup> Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mushārahah*

<sup>3</sup> Laporan Magang Penulis pada BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 (12-20 Oktober 2020), 13-14.

menawarkan nisbah bagi hasil yang kemudian jika calon nasabah setuju maka nisbah tersebut disepakati kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Setelah menyepakati pembagian nisbah bagi hasil, selanjutnya *Account Officer* (AO) akan melakukan analisa kelayakan pembiayaan, jika dirasa layak untuk dilanjutkan maka terjadilah akad yang dilakukan oleh bagian legal dan kemudian pencairan modal yang dilakukan oleh *teller*. Nasabah diminta untuk membuat laporan keuangan setiap bulan untuk mengetahui realisasi keuntungan yang diperoleh sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1.

Seperti Bapak Elvanus yang membutuhkan dana tambahan untuk usahanya dibidang jasa penginapan dan jual-beli *guesthouse* kemudian mengajukan pembiayaan *mushārah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 sebesar Rp 100.000.000,00 dengan jangka waktu angsuran selama 6 bulan dan bagi hasil sebesar Rp 2.000.000,00 dari nasabah. Berikut perhitungannya:

- Modal dari BPRS Rp 100.000.000,00 dengan jangka waktu 6 bulan.
- Bagi hasil yang diberikan oleh BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 Rp 2.000.000,00 per bulan.
- Jumlah angsuran yang harus dibayar nasabah bulan pertama hingga bulan ke-5 sebesar Rp 2.000.000,00 dan dibulan ke-6 sebesar Rp 2.000.000,00 untuk bagi hasil + Rp 100.000.000,00 untuk modal = Rp

<sup>4</sup> Mulyadi, *Wawancara*, Surabaya, 18 Mei 2021.

102.000.000,00 yang harus Bapak Elvanus bayar dibulan terakhir akad yang berlangsung.

Begitu juga Bapak Hari Setiawan yang membutuhkan dana tambahan untuk usahanya dibidang perdagangan alat kesehatan sehingga mengajukan pembiayaan *mushārah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 sebesar Rp 425.850.000,00 dengan jangka waktu angsuran selama 2 bulan dan bagi hasil sebesar Rp 6.387.750,00. Berikut perhitungannya:

- Modal dari BPRS Rp 425.850.000,00 dengan jangka waktu 2 bulan.
- Bagi hasil yang diberikan oleh BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 Rp 6.387.750,00 per bulan.
- Jumlah angsuran yang harus dibayar nasabah pada bulan pertama sebesar Rp 6.387.750,00 dan pada bulan ke-2 sebesar Rp 6.387.750,00 untuk bagi hasil + Rp 425.850.000,00 untuk modal pokok = Rp 432.237.750,00 yang harus Bapak Hari Setiawan bayar.

B. Analisis Hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Modal Usaha melalui Akad *Mushārah* di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1

*Mushārah* dalam kitab *Fath al-Qarib* ialah:<sup>5</sup>

فِي الشَّرَكَةِ وَهِيَ لُغَةٌ الْإِحْتِلَاطُ وَشَرْعًا ثُبُوتُ الْحَقِّ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ لِإِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ

*Shirkah* secara bahasa adalah bercampur. Dan secara syariat adalah tetapnya hak secara umum pada barang satu bagi dua orang atau lebih.

<sup>5</sup> Syaikh al Alim al-‘Allamah Syamsuddin Abu Abdilah Muhammad bin Qasim al-Ghuzzi asu-Syafi’I, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Terj. Ibnu Aby Zain, (Kediri: Zam-Zam Sumber Mata Air Ilmu, 2015), 339.

Dalam akad, disamping mengatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, juga harus menyepakati tentang hasil yang akan dibagihasilkan. Bagi hasil tentunya tidak proporsional atas modalnya, karena salah satu sebagai pengelola, sementara yang lainnya tidak. Hal yang paling penting pada saat akad adalah telah disepakatinya tentang nisbah bagi hasil. Selain itu, karena hasil usaha pada akad *mushārah* ialah belum pasti, maka harus pula menyepakati tentang proyeksi sebagai dasar perhitungan aktualisasi yang sebenarnya terjadi.<sup>7</sup>

Dalam hal pembagian keuntungan Ulama Hanafi dan Hambali, mereka berpendapat bahwa keuntungan yang akan diperoleh dalam bermitra harus ditentukan berdasarkan kelayakan masing-masing mitra usaha, dan besaran persentase harus disepakati saat akad berlangsung. sedangkan Maliki

<sup>7</sup> Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 80-81.

Apabila terjadi kerugian, ulama bersepakat bahwa kerugian tersebut ditetapkan berdasarkan nilai modal dari masing-masing pihak yang berakad. Hal tersebut karena kerugian tergolong ke dalam pengurangan modal yang ditanggung oleh si pemilik modal itu sendiri, kecuali sebagian dari risiko tersebut dipindahkan kepada pihak lain karena kelalaiannya.<sup>9</sup>

Pada dasarnya, setiap kegiatan muamalah ialah *mubah* (dibolehkan), selama tidak ada dalil al-Qur'an maupun sunah yang melarangnya. Melakukan kegiatan muamalah haruslah semata-mata untuk mendatangkan maslahat, manfaat dan menghilangkan kemudharatan dalam masyarakat. Selain itu, muamalah juga harus dilaksanakan dengan menegakkan nilai

<sup>9</sup> Ibid, 143.



keadilan, guna menghindari unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>10</sup>

*Mushārakah* ialah termasuk dalam akad yang diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah Swt.:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Daud berkata: ‘Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepadaku kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.’ Dan Daud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhan-Nya lalu menyungkur sujud dan bertobat. (Q.S. *Sad*: 24)<sup>11</sup>

Selain itu, terdapat pula sunah yang memperbolehkan *mushārahah*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَا ثَلِثُ الشَّرِكَائِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Dari Abu Hurairah r.a, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Allah Swt. berfirman, ‘Aku menjadi pihak ke tiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat maka Aku keluar dari (persekutuan) mereka.’” (Hadis Riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh al-Hakim)<sup>12</sup>

Berdasarkan ayat dan sunah di atas menunjukkan bahwa *mushārahah* ialah yang diperbolehkan selama mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianati. Jika salah satu dari mereka berbuat curang, maka Allah akan mencabut berkah dari hartanya.

<sup>10</sup> Juanda, *Fiqh Muamalah Prinsip-prinsip Pratis Bermuamalah secara Syar'i*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 68-69.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), 454.

<sup>12</sup> Imam Hafiz Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar-al-Fikri, 1987), 543.

*Mushārah* sering juga disebut *shirkah*, yang secara garis besar dibagi menjadi dua:<sup>13</sup>

1. *Shirkah amlāk*

Terdiri dari:

- a. *Shirkah ikhtiyār*
- b. *Shirkah jabār*

## 2. *Shirkah ‘uqūd*

Terdiri dari:

- Shirkah ‘inān,*
- Shirkah ‘abdān,*
- Shirkah muḍārabah,*
- Shirkah wujūh,*
- Shirkah mufāwadah.*

Praktik *mushārah* yang dijalankan oleh BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 ialah *shirkah muḍārah*, yaitu praktik kerjasama antara dua orang atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan kontribusi kerja (*‘amal*), sedangkan pihak lain memberikan kontribusi kerja (*māl*).

Dalam suatu akad, rukun dan syarat merupakan hal yang harus dipenuhi guna menjadikan sahnya akad tersebut. Jika hilang salah satu dari semua rukun maka akad tersebut dianggap rusak. Rukun *mushārah* yang

<sup>13</sup> Muhammad Pudjiharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), 58.

Pada praktiknya, BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 telah memenuhi rukun *mushārah*. Namun, dalam syarat *mushārah* terdapat satu bagian yang tidak sesuai yaitu pada penentuan nisbah bagi hasilnya. BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 selain melakukan penetapan nisbah dengan persentase, juga melakukan penetapan dengan menyebutkan nominal. Padahal, pada syarat *mushārah*, disebutkan bahwa penentuan bagi hasil yang harus nasabah bayarkan kepada pihak Bank tidak boleh menyebutkan dalam jumlah nominal atau uang yang tetap dan ditetapkan di akad. Penetapan ini akan menyebabkan terjadinya riba.

<sup>15</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 144-145.



Berdasarkan fatwa tersebut telah jelas memaparkan bahwa tidak ada jumlah yang ditentukan di awal akad dan keuntungan harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan yang didapatkan. Dalam hal ini BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 menerapkan bagi hasil tidak sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan DSN MUI, karena jumlah nisbah keuntungan telah ditetapkan di awal saat melakukan akad perjanjian yang mana jumlah keuntungannya belum diketahui.

<sup>19</sup> Ibid.



Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan kesimpulan di atas, adalah sebagai berikut:

- [illegible]





- Muhamad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2010.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Buku Standar Produk Perbankan Syariah Mushārah dan Mushārah Mutanaqisah*. Jakarta, 2016.
- Pudjiharjo, Muhammad dan Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Rivai, Veithzal dan Antonio Nizar Usman. *Islamic Economics and Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Shamad, Baihaqi A. *Konsepsi Shirkah dalam Islam Perbandingan antar Mahzab*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press Banda Aceh, 2007.
- Sholahuddin, Muhammad. *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah A-Z*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Soemitro, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- Standar Operasional Prosedur (SOP) BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- , *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- , *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: alfabeta, 2009.

Sulaiman Bin Ash'ath Imam Hafiz Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. Beirut: Dar-al-Fikri, 1987.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung: Media Press, 1999.

Syaikh al Alim al-‘Allamah Syamsuddin Abu Abdilah Muhammad bin Qasim al-Ghuzzi asu-Syafi’I, *Fathul Qarib al-Mujib*, Terj. Ibnu Aby Zain, (Kediri: Zam-Zam Sumber Mata Air Ilmu, 2015), 339.

Tim Penyusun Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.

Yazid, Muhammad. *Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbaankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

## Undang-Undang

Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mushārahah*.

Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005.

Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

## Penelitian

Latif, Abdul Chefi. “*Pembiayaan Muḍhārabah dan Pembiayaan Mushārahahdi Perbankan Syariah*”. Jurnal Ilmu Akuntansi dam Bisnis Syariah, No. 10, Vol. 2, Januari, 2020.

Laporan Magang Penulis pada BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 (12-20 Oktober 2020).

Nadhiroh, Nur Alfina. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil dalam Pembiayaan *Mushārah*di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo”. Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2017.

Novita, Riska Dwi. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pembiayaan *Mushārah* (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Komunitas Usaha Mikro Berbasis Masjid (KUM3) Rahmat Surabaya)”. Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2014.

Noviyanti, Duwi. “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Jaminan pada akad pembiayaan *Mushārahah* (Studi

Perdana, Raka Putra. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementas Pembiayaan *Mushārah* di Pengelolaan Syariah Trade Center (STC) Pasar Turi Surabaya”. Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019.

Yahya, Muchlis dan Edy Yusuf Agunggunanto. “*Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Islam*”. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, No. 1, Vol. 1, Juli, 2011.

Elvanus. *Wawancara*. 4 Juni 2021.

Mulyadi. *Wawancara*. Surabaya, 05 Mei 2021.

Pram Puji Rahayu. *Wawancara*. Surabaya, 6 Mei 2021.